

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia di mana terdapat 27 kabupaten/kota. Dalam menjalankan kegiatannya pemerintah melakukan penyusunan anggaran setiap tahunnya, sehingga setiap akhir tahun pemprov - pemda/pemkot membuat laporan keuangan mengenai realisasi anggaran, APBD, dll. Ketika laporan keuangan sudah selesai dibuat maka pemerintah harus melakukan publikasi terhadap laporan keuangannya sehingga para masyarakat mengetahui kinerja dari pemerintah tersebut. Namun nyatanya dari 27 kabupaten/kota di Jawa barat, enam diantaranya belum mempublikasikan laporan keuangan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar (Mediaindonesia.com, 2021). Salah satu dari enam kabupaten/kota yang belum mempublikasikan laporan keuangan hasil audit yaitu Kabupaten Bekasi. Untuk penyebab belum dilakukannya publikasi dikarenakan masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemkab Bekasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan, serta kepentingan masyarakat di daerah- daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tujuan utama adanya otonomi daerah untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) Adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Putra, 2016) dalam (Setyowati & Yaya, 2017). Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang dilakukan secara transparansi untuk mencapai *good governance* dalam (Rahmayanti, 2020). Pada Tahun 2020, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia memperoleh skor 37/100 dan berada diperingkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Sedangkan pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 40/100, hasil tersebut merupakan pencapaian tertinggi selama 25 tahun dalam perolehan skor

CPI Indonesia (Suyatmiko, 2020). Dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) ketika skor CPI yang diperoleh rendah maka dikatakan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Maka dari itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus menjadikan informasi publik yang transparan dan berbasis masyarakat sebagai bagian dari proses pelayanan agar dapat mengakses informasi secara cepat, efisien, mudah dan terjangkau. , salah satunya adalah informasi berkala atas laporan keuangan. (Setyowati & Yaya, 2017).

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007) dalam (Kusuma, 2012). Penerapan transparansi laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pemerintahan demi mencapai *good governance* dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dana secara amanah dan lancar (Kristiana, 2021). Pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan dana, sehingga perlu penerapan transparansi keuangan agar menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Setyowati & Yaya, 2017) variabel X yang terdiri dari tekanan eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap variabel y yaitu penerapan transparansi laporan keuangan. Bedanya dengan penelitian kali ini peneliti menambahkan variabel akuntabilitas dan pengendalian internal, serta menghapus variabel sumber daya manusia dipenelitian sebelumnya.

Ketidakpastian lingkungan merupakan keadaan dimana setiap bagian organisasi harus bisa menyesuaikan antara kondisi disekitar maupun kondisi organisasi itu sendiri, apabila organisasi tidak bisa melakukan adaptasi terhadap dinamika maka berpotensi menghalangi kemampuan organisasi tersebut (Budiartini & Putra, 2021). Ketika ketidakpastian lingkungan meningkat maka organisasi harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan barunya sehingga ketika organisasi sudah siap dengan segala keadaan maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan (Pradita et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan

Karina Dwi dkk. (2019) dalam (Budiartini & Putra, 2021), menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif pada transparansi pelaporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah ditugaskan kepada individual maupun organisasi. Amelia (2015) dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas segala aktivitas yang dilakukan lalu disampaikan hasilnya dalam bentuk penerapan transparansi keuangan. Maka dari itu jika akuntabilitas sangat rendah bisa dikatakan rendahnya keinginan suatu organisasi publik untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Salah satu tujuan transparansi yaitu menjadi sistem pengendalian yang bisa membantu mencegah terjadinya hal-hal negatif yang bisa merugikan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Hamdi (2017) dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Tekanan eksternal merupakan tekanan berupa peraturan atau pengaruh dari luar OPD sehingga bisa menekankan untuk melakukan penerapan transparansi keuangan (Budiartini & Putra, 2021). Syahril dkk (2018) dalam (Pradita et al., 2019) berpendapat bahwa tekanan eksternal merupakan tantangan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatannya dengan mematuhi segala peraturan serta undang-undang yang dibuat pemerintah. Adanya peningkatan tekanan eksternal memicu dan meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang diungkapkan Noprizal (2017) dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan proses pengendalian kepada seluruh aktifitas-aktifitas pegawai yang dimana dilakukan oleh seorang pimpinan secara rutin supaya kinerja dari organisasi tersebut bisa optimal (Fathmaningrum & Mukti, 2019). Sedangkan dalam pemerintahan pengendalian internal merupakan bentuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi dipemerintah daerah maupun pusat. Penerapan transparansi laporan keuangan merupakan bagian dari pengendalian internal itu sendiri. Hasil penelitian yang diungkapkan Nur Laila Yuliana (2017)

dalam (Budiartini & Putra, 2021) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan

Komitmen dapat diartikan juga sebagai kecenderungan merasa aktif dalam suatu kegiatan yang melekat pada diri individu (Purnamasari, 2016) dalam (Setyowati & Yaya, 2017). Hamdi (2017) dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) mengatakan bahwa hal tersebut berhubungan dengan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Sedangkan komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Noprizal (2017) dalam (Fathmaningrum & Mukti, 2019) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis menggunakan variabel ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan transparansi laporan keuangan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan data terbaru, penambahan kriteria sampel dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi Sebagai Populasi pada penelitian ini. Diharapkan penelitian ini bisa dilakukan lebih representatif. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan?

3. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan?
5. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dibidang akademik

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau dasar untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik penerapan transparansi laporan keuangan dan disempurnakan lagi menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

2. Manfaat dibidang non akademik

Penelitian ini bisa menjadi pengetahuan dasar dan pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui tentang hal – hal apa saja yang mempengaruhi penerapan transparansi laporan keuangan.

## **1.5 Sistematika Pelaporan**

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.